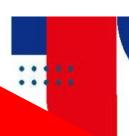






# DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK III





LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

PPID UTAMA KABUPATEN KAPUAS HULU



PPID UTAMA KABUPATEN KAPUAS HULU Jl. Antasari Nomor 8, Putussibau Utara Kantor Diskominfo Statistik



Rincian Layanan

Permohonan Masuk, Waktu yang dibutuhkan, Dikabulkan dan Ditolak

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

> Keberatan, Tanggapan Atas Keberatan, Hasil Mediasi, Jumlah Gugatan, Hasil Putusan

Kendala

Eksternal dan Internal

Rekomendasi Tindak Lanjut

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi dari semua pelayanan informasi publik yang PPID Kabupaten Kapuas Hulu lakukan sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini kami buat sesederhana mungkin agar mudah dipahami namun tidak mengurangi maksud dan tujuan laporan itu sendiri.

menyadari masih kekurangan pada laporan ini, oleh sebab itu kami sangat membutuhkan segala saran dan masukan penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih

Januari 2023

PPD Kabupaten Kapuas Hulu,

NATA.S.STP.M.Si Pembina TK.I

NIP. 19810207 200002 1 001

# GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN

# **GAMBARAN UMUM**

# Kebijakan

# Pengelolaan Informasi Publik

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian untuk mewujudkan governance). pemerintahan yang baik (good Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah keterbukaan bagi masyarakat memperoleh informasi. Sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat akan infromasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan melalui keterbukaan pemerintahan, publikdiharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik

Guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahunnya menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik sebagai acuan badan publik untuk memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat.



# Gabung menjadi pelape. hanya dengan **sms** ke

1708

Dapat digunakan pada operator TELKOMSEL, INDOSAT, XL AXIATA, FLEXI, ESIA, CERIA, AXIS, SMART, SMARTFREN, 3

Buat laporan baru beserta data dan foto pendukung, langsung dari smartphone Anda. Nikmati pula kemudahan akses hasil tindak lanjut dan komentar publik dari laporan -laporan yang sudah Anda buat. **Kapanpun, dimanapun** 



Adapun dasar hukum pelaksanaan layanan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- 1. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 4. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 284 Tahun 2022 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Pemerintah Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 46 /DRIS/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbane : bahwa dengan berlakunya Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Fedoman Pengsiolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Deerah perlu dilakukan Perubahan terhadap Pejabat Pengelola Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapues Hulu;

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Danurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tinakat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 184 /DKIS/ 2022

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU.

fenimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsek dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerin





Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan fungsi layanan informasi dan dokumentasi, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan 3 (tiga) *platform* web aplikasi, antara lain :

# 1. Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat )

yaitu sebuah layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan dan fasilitas publik yang dilakukan secara *online* dan terintegrasi;

# 2. Aplikasi PPID ( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi )

yaitu aplikasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan serta memberikan layanan terkait dengan informasi publik kepada masyarakat secara *online*;

3. **Portal Berita Bersama (info.kapuashulukab.go.id)** yaitu portal berita yang merangkum berita dari setiap OPD terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD, dimana masing masing OPD berperan sebagai kontributor berita.

Ketiga aplikasi tersebut wajib dikelola oleh semua unit kerja daerah/OPD agar masyarakat Kapuas Hulu dapat mengakses berbagai terkait informasi dengan pemerintah daerah, maupun berkomunikasi memberikan dengan aspirasi atau pun aduan yang nantinya akan ditanggapi secara langsung oleh unit kerja terkait.

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN







# Sarana Pelayanan Informasi Publik:

- 1. Gedung Layanan Informasi Publik
- 2. 1 Meja Layanan
- 3. 2 Kursi Pemohon Informasi
- 4. 1 Set Kursi Tunggu
- 5. 1 Laptop Petugas



No	Klasifikasi Personil	Tersedia
1	Personil PPID	<ul> <li>Pembina, Pengarah, PPID , Sekretaris dan 4 orang Koordinator Bidang.</li> <li>Staf Pengelola layanan PPID merupakan Staf pada Bidang KIP Diskominfotik Kapuas Hulu</li> </ul>
2	PPID Pelaksana	<ul><li>Sekretaris Seluruh OPD</li><li>Sekretaris Seluruh Kecamatan</li><li>Kabag Umum BUMD</li></ul>

# ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK T.A 2022



Rp. 127.843.328

Adapun rincian penggunaanya dapat dilihat pada grafik chart dibawah :

# Belanja Barang Pakai Habis

Terdiri dari Belanja ATK, Belanja Cetak dan Belanja Bahan Komputer sebesar Rp. 16.045.328.-



# 38,80 %

# Belanja Jasa

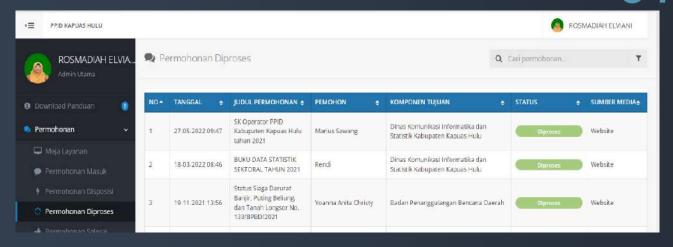
Terdiri dari Honorarium Tim Pengelola Web e-PPID dan Belanja Admin Aplikasi PPID sebesar Rp. 49.600.000,-

# Perjalanan Dinas

Terdiri dari Perjalanan Dinas ke Pontianak dan Kecamatan total sebesar Rp. 62.198.000,-



# RINCIAN LAYANA INFORMASI PUBLIK



# Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2022

Jumlah dokumen yang tersedia di aplikasi ppid.kapuashulukab.go.id adalah 3.205 dokumen. Sedangkan permintaan informasi publik pada Tahun 2022 hanya dilakukan melalui aplikasi ppid.kapuashulukab.go.id. Untuk permintaan melalui aplikasi dapat langsung mendownload dokumentasi publik yang telah tersedia, dan jika dokumen pada arsip aplikasi tidak ditemukan maka pemohon informasi mengisi form permohonan pada aplikasi PPID. Untuk dokumen yang telah didownload sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 61.408 dokumen.

61.408

Download dokumen publik

2 Melalui aplikasi

Melalui Surat



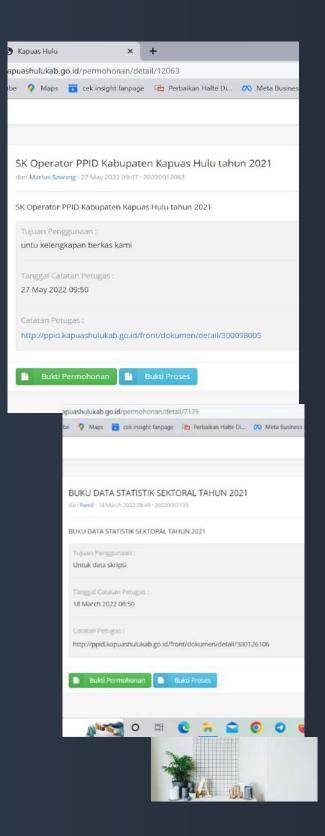
# Waktu Proses Layanan Informasi Tahun 2022



Waktu tercepat proses layanan yang dilaksanan via aplikasi pada Tahun 2022 adalah 1 hari kalender



Waktu terlama proses layanan yang dilaksanakan via aplikasi Tahun 2022 adalah 1 hari kalender



Jumlah Permohonan diKabulkan Tahun 2022



2 dikalbulkan

Bersumber dari aplikasi PPID



# Informasi Di Tolak Tahun 2022

 Tidak ada informasi ditolak pada tahun 2022



# RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

# Jumlah keberatan yang diterima Tahun 2022

Tidak ada keberatan yang diterima pada tahun 2022

# Tanggapan atas keberatan yang diterima Tahun 2022

Tidak ada keberatan yang diterima pada tahun 2022

# Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

Penyelelesaian sengketa informasi merupakan kelanjutan dari sengketa yang terjadi pada tahun 2021 antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melawan LSM Pemantau Keuangan Negara







# Hasil Keputusan KI

Hasil keputusan Komisii Informasi menolak permohonan pemohon yaiitu LSM Pemantau Keuangan Negara yang diajukan pada tahun 2021 secara keseluruhan

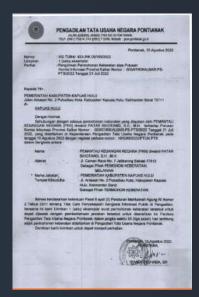




# Jumlah gugatan yang di ajukan ke pengadilan

LSM PKN mengajukan keberatan atas hasil keputusan Komisi Informasi ke PTUN Pontianak





# Hasil Putusan Pengadilan

# Hasil Keputusan PTUN Pontianak :

- Menyatakan hasil permohonan pemohon keberatan tidak diterima;
- Menguatkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat;
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.





# KENDALA EKSTERNAL/ INTERNAL

# Kendala Eksternal Kendala Internal Masih minimnya permintaan informasi dari masyarakat yang disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Minimnya anggaran pada kebutuhan informasi publik kegiatan pelayanan informasi dan belum mengetahui dimana publik bisa memperoleh informasi - Masih kurangnya inisiatif OPD publik secara online maupun

- offline, ini terlihat belum banyak masyarakat yang melakukan permintaan informasi publik melalui aplikasi maupun secara langsung;
- Kendala teknis pada aplikasi PPID yaitu, tidak adanya notifikasi permohonan SELESAI pada saat proses permohonan dikabulkan,, padahal si peminta informasi sudah menerima informasi yang diminta hal ini sudah dikonsultasikan beberapa kali ke pemilik aplikasi PPID (Kemendagri), namun sampai dengan saat ini belum ada solusi untuk permasalahan tersebut.

- untuk meng*update* DIP pada aplikasi PPID (proses updating menunggu arahan dari PPID
- Kurangnya pemahaman OPD terhadap peran dari PPID Pelaksana dalam melakukan pelayanan informasi publik;

# REKOMENDASI/ RENCANA TINDAK LANJUT

# Rencana Tindak Lanjut



- Mempertahankan indeks Keterbukaan Informasi Publik yang sudah diperoleh dengan terus meningkatkan pelayanan publik
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi dan dokumentasi pada penyelenggaraan melalui Bimtek tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Mengadakan RAKOR PPID dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Dan Inspektorat Provinsi;
- Terus berkomunikasi dengan Kemendagri terkait dengan permasalahan aplikasi PPID;
- Akan lebih aktif menyampaikan informasi ataupun kebijakan terbaru terkait dengan pelayanan informasi publik pada WAG PPID Pelaksana maupun WAG Operator Aplikasi;
- Lebih meningkatkan lagi sosiallisasi mengenai aplikasi PPID kepada masyarakat melallui event-event besar yang diselenggarakan di Kapuas Hulu;
- Pembinaan Desa mandiri yang semula hanya 2 Desa menjadi 5 Desa;
- Terus berkoordinasi dengan adminadmin/operator PPID OPD terkait hambatanhambatan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi

# LAMPIRAN





# BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 46 /DKIS/ 2022

### TENTANG

## PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

## DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

### BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Dalam Negeri

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman



# BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 184 / DKIS/ 2022

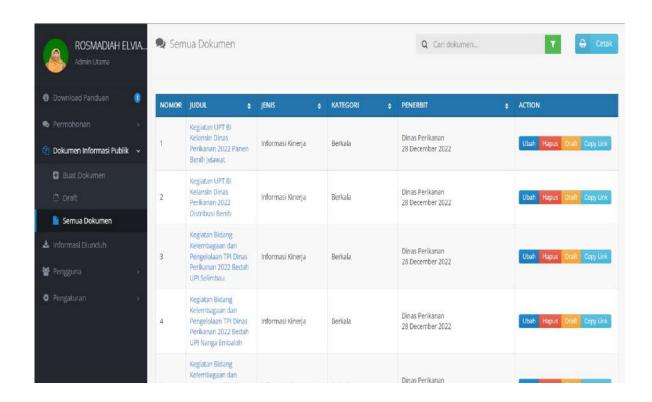
## TENTANG

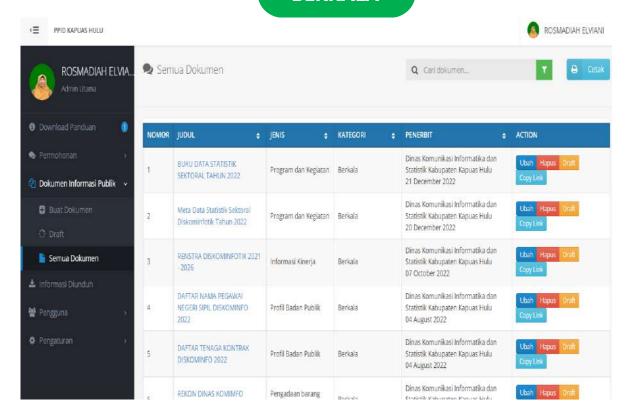
# PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

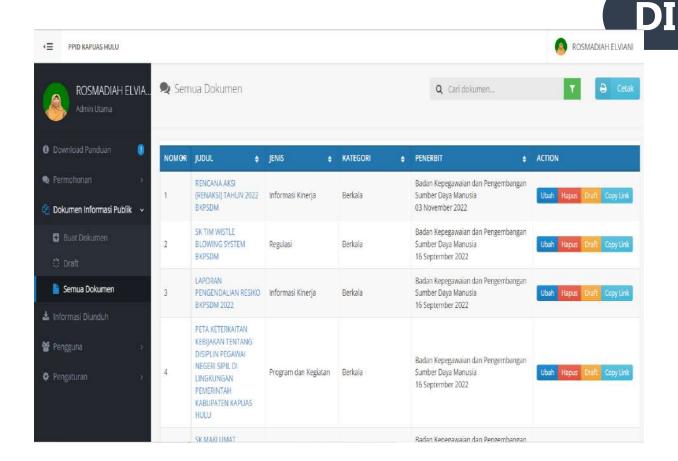
# BUPATI KAPUAS HULU,

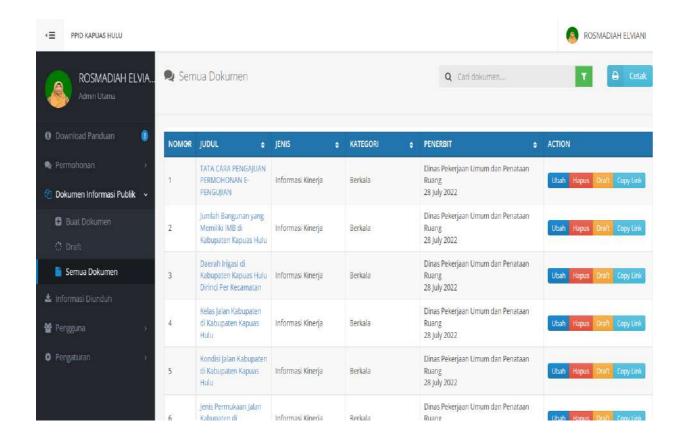
Menimbang

: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah

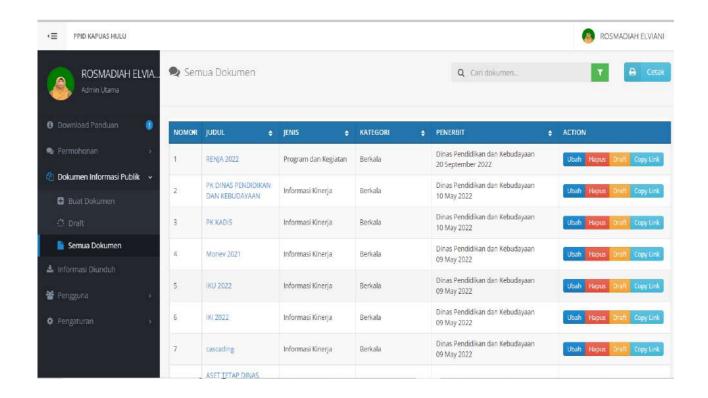


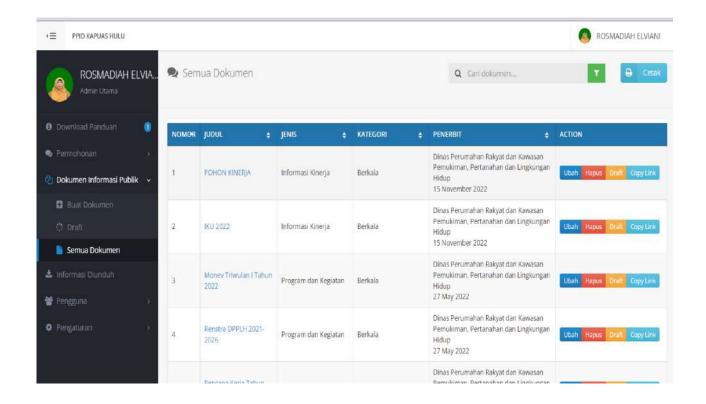




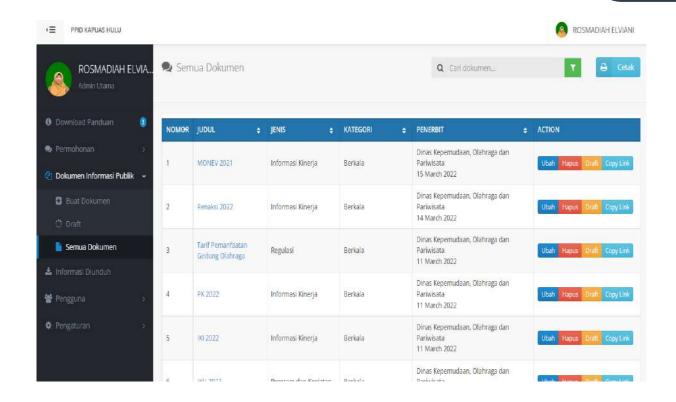


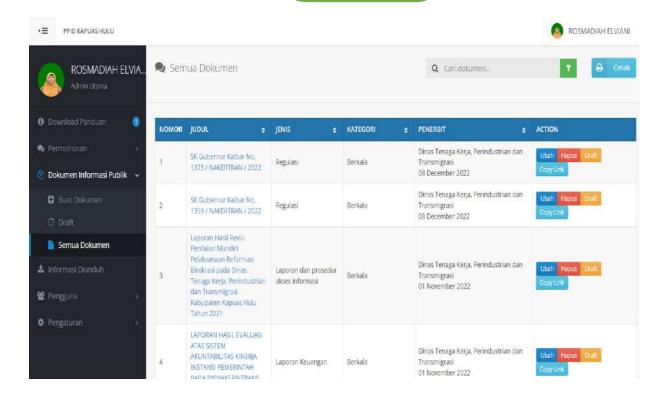




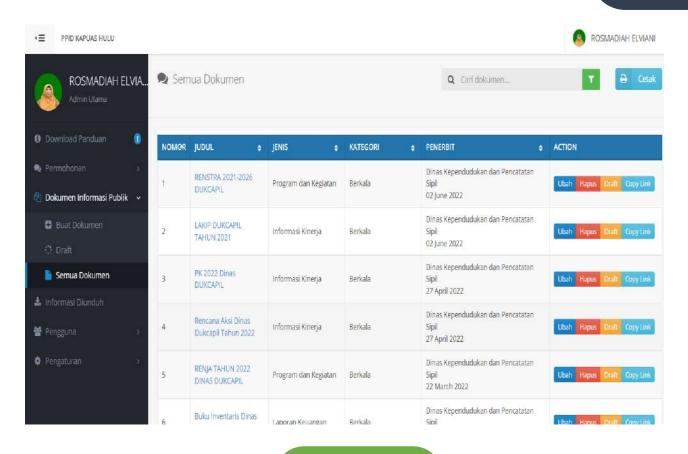


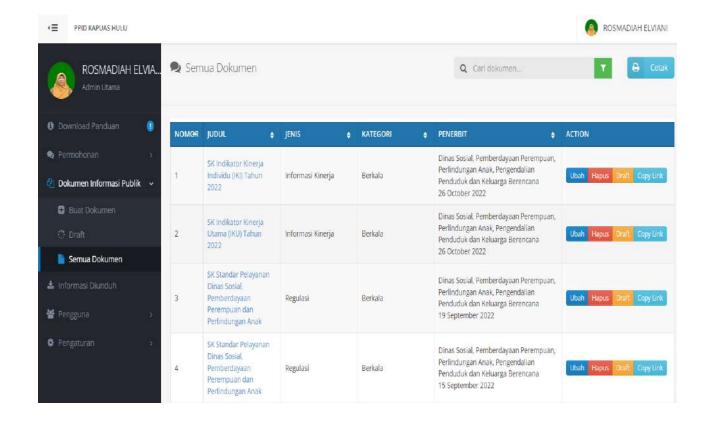




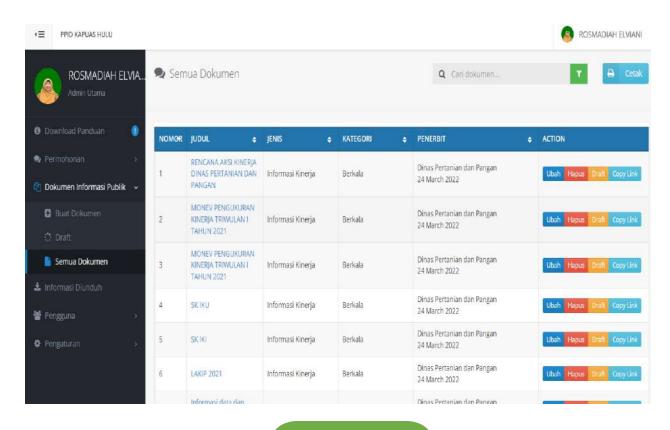


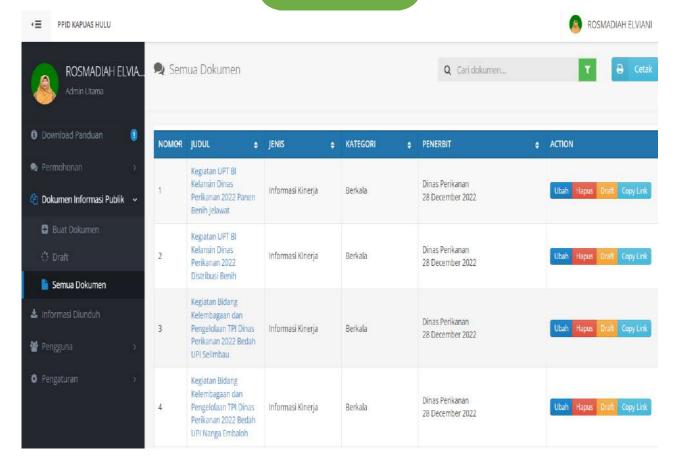




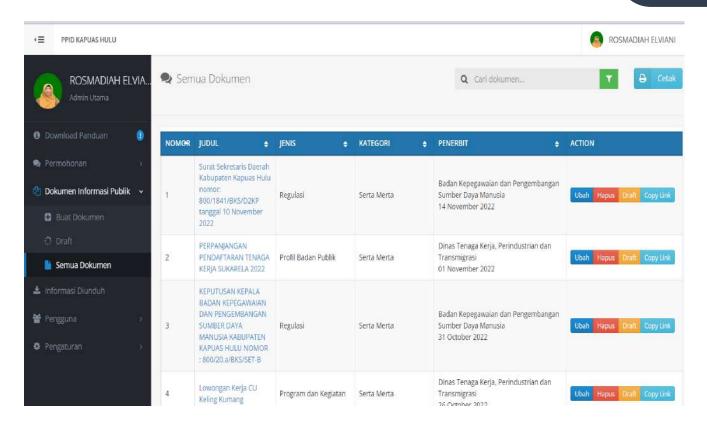












# **SERTA MERTA**

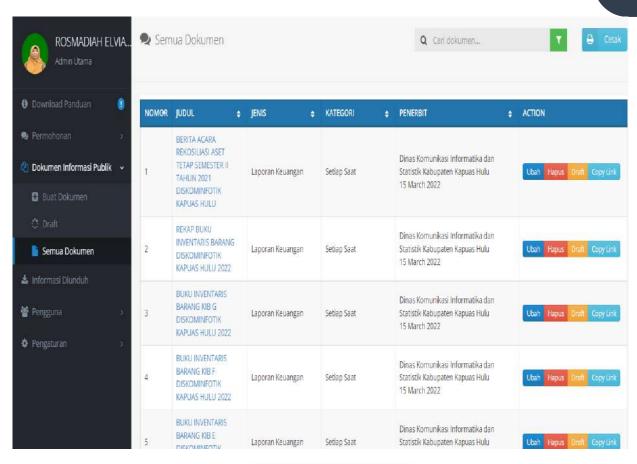
♣ Informasi Diunduh     ♣ Pengguna     ◆ Pengaturan	3	KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 800/20.a/BKS/SET-B	Regulasi	Serta Merta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 31 October 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
	4	Lowongan Kerja CU Keling Kumang	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 26 October 2022	Ubah Hapus Braft CopyLink
	5	Lowongan Kerja KSP Lantang Tipo	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 04 October 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
	6	Pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 04 October 2022	Ubah Hapus Draft CopyLink
	7	Surat pemberitahuan pemeliharaan jaringan LKPP	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Kecamatan Selimbau 26 May 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
	8	LAP. KEGIATAN HARIAN CAMAT KALIS BULAN PEBRUARI 2022	Informasi Kinerja	Serta Merta	Kecamatan Kalis 25 April 2022	Ubah Hapus Braft Copy Link
	9	ANGKUTAN SPEED BOAT PUTUSSIBAU - SUHAID 2021	Informasi Kinerja	Serta Merta	Dinas Perhubungan 05 April 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link



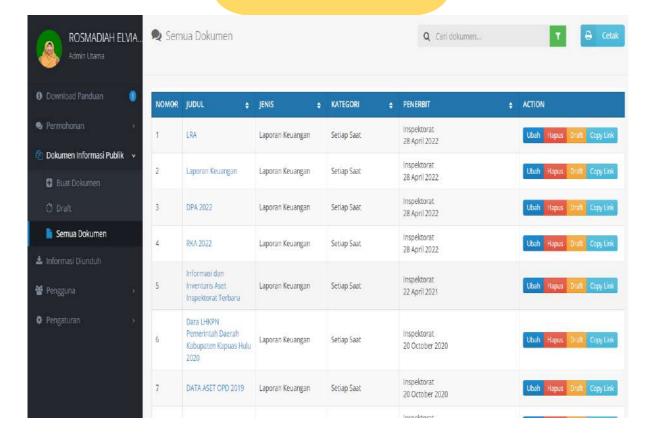
# SERTA MERTA

5	Lowongan Kerja KSP Lantang Tipo	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 04 October 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
6	Pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 04 October 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
7	Surat pemberitahuan pemeliharaan jaringan LKPP	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Kecamatan Selimbau 26 May 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
8	LAP. KEGIATAN HARIAN CAMAT KALIS BULAN PEBRUARI 2022	Informasi Kinerja	Serta Merta	Kecamatan Kalis 25 April 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
9	ANGKUTAN SPEED BOAT PUTUSSIBAU - SUHAID 2021	Informasi Kinerja	Serta Merta	Dinas Perhubungan 05 April 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
10	ANGKUTAN SPEED BOAT PUTUSSIBAU - BUNUT 2021	Informasi Kinerja	Serta Merta	Dinas Perhubungan 05 April 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link

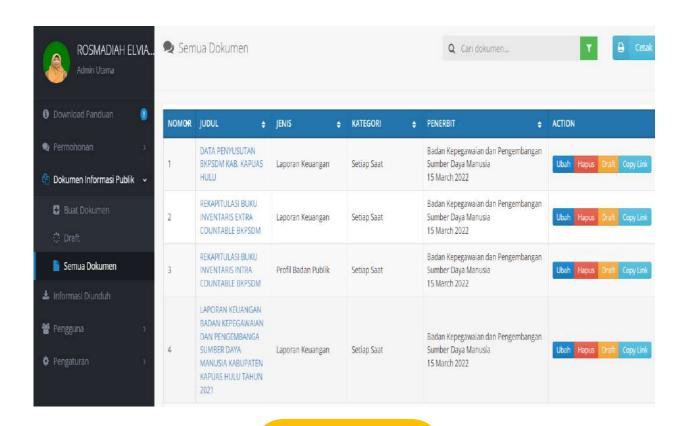




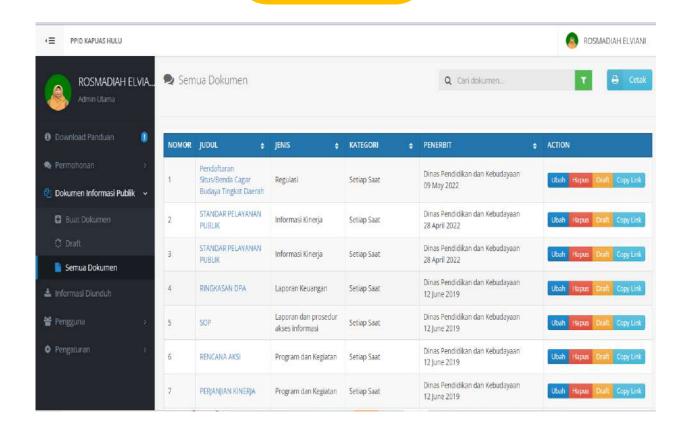
# **SETIAP SAAT**



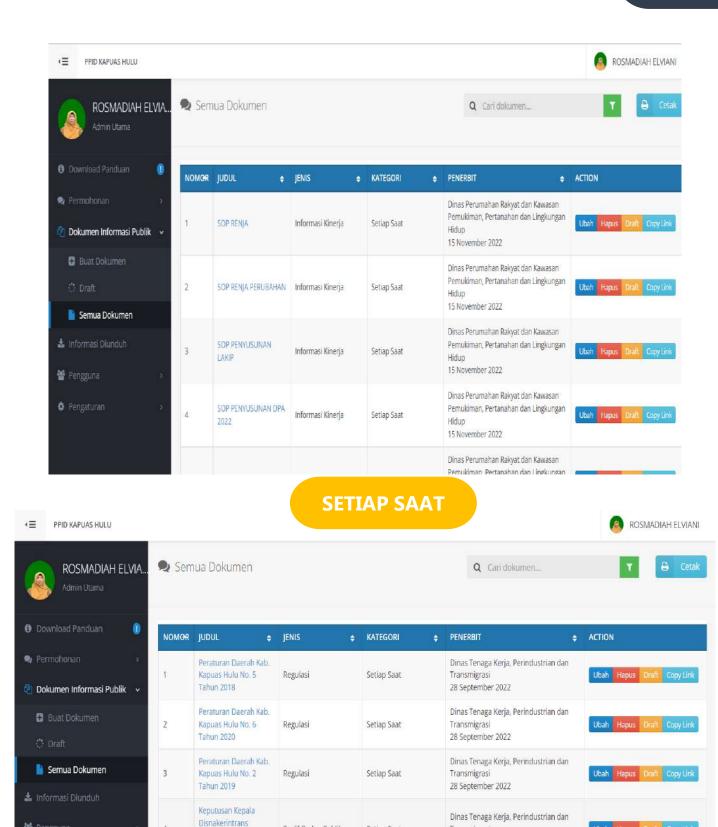




# **SETIAP SAAT**







Profil Badan Publik

Profil Badan Publik

Setiap Saat

Setiap Saat

Transmigrasi

31 May 2022

Transmigrasi

31 May 2022

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

Ubah Hapus Draft Copy Link

Pengguna

Pengaturan

4

Tentang Maklumat

Keputusan Kepala

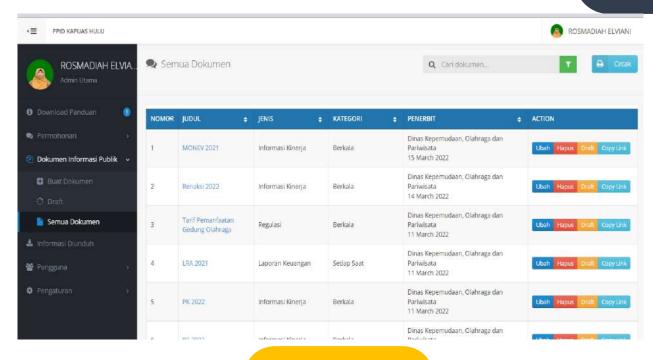
Disnakerintrans

Tentang Budaya

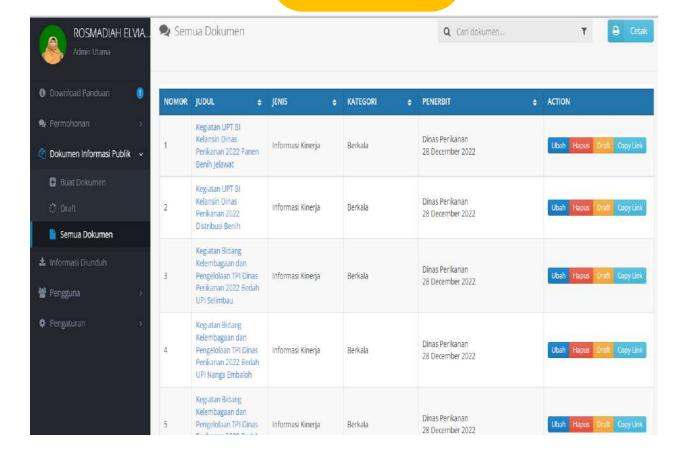
Pelayanan

Pelayanan





# **SETIAP SAAT**







Alamat : Jalan Antasari No. 8 Putussibau Email : ppid@kapuashulukab.go.id **PUTUSSIBAU 78711** 

## FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

	Nomor Pendaftaran *:
Nama	#
Alamat	1
Nomor Telepon/Email	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	*
Tujuan Penggunaan Informasi	I
Cara Memperoleh Informasi**	: Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***  Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi***	; Mengambil Langsung
	☐ Kurir
	Faksimili Email
	Putussibau,
Petugas Pelayanan Informasi Penerima Permohonan Informasi	Pemohon Informasi
()	(

- Keterangan:

  \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik

  \*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

  \*\*\* Coret yang tidak perlu



## DIBALIK FORM PERMOHONAN INFORMASI

## Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I.	Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
11.	PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
ш.	Pemohon Informasi berhak mendapatkan <b>pemberitahuan tertulis</b> tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu <b>10 (sepuluh) hari kerja</b> sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis <b>1 x 7 hari kerja</b> , dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
IV.	<b>Biaya</b> yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
V.	Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh

Pemohon Informasi Publik.





Alamat : Jalan Antasari No. 8 Putussibau Email : ppid@kapuashulukab.go.id PUTUSSIBAU 78711

## PEMBERITAHUAN TERTULIS

	650		
Nam	The same of the sa		
Alar	nat		
No.	Felp/Email :	***************************************	
11316	300000000000000000000000000000000000000	S HARMONIA MARCO	
	eritahuan sebagai berikut; nformasi <mark>D</mark> apat Diberika	i	
No.	Hal-hal terkait Informasi		Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik**	☐ Kami ☐ Badan Pub	lik lain, yaitu
2.	Bentuk fisik yang tersedia**		ermasuk rekaman). salinan tertulis.
3.	Biaya yang dibutuhkan**		Rp x(jumlah lembaran) = Rp
			Rp
		☐ Lain-lain	Rp
		Jumlah	Rp
4.	Waktu penyediaan	hari	
5.	Penjelasan penghitaman/p bila perlu)	engaburan Informas	i yang dimohon**** (tambahkan kertas
В. 1	informasi tidak dapat dib Informasi yang diminta Informasi yang diminta	engaburan Informas erikan karena:** belum dikuasai a belum didokument	asikan
В. 1	informasi tidak dapat dib Informasi yang diminta Informasi yang diminta	engaburan Informas erikan karena:** belum dikuasai a belum didokument	
В. 1	informasi tidak dapat dib Informasi yang diminta Informasi yang diminta	engaburan Informas erikan karena:** belum dikuasai a belum didokument	asikan ikan dilakukan dalam jangka waktu**** Putussibau,
В. 1	informasi tidak dapat dib Informasi yang diminta Informasi yang diminta	engaburan Informas erikan karena:** belum dikuasai a belum didokument	asikan ikan dilakukan dalam jangka waktu**** Putussibau, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas
В. 1	informasi tidak dapat dibe □ Informasi yang diminta □ Informasi yang diminta Penyediaan informasi yang b	engaburan Informas erikan karena:** belum dikuasai a belum didokumentas belum didokumentas	asikan ikan dilakukan dalam jangka waktu****  Putussibau,  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID)  ()  Nama & Tanda Tangan
B. I	informasi tidak dapat dibe □ Informasi yang diminta □ Informasi yang diminta enyediaan informasi yang l	engaburan Informas erikan karena:** belum dikuasai a belum didokumentas elum didokumentas	asikan ikan dilakukan dalam jangka waktu****  Putussibau,  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID)  ()  Nama & Tanda Tangan  da formulir permohonan.
В. 1	Informasi tidak dapat dibe  Informasi yang diminta  Informasi yang diminta  Informasi yang diminta Penyediaan informasi yang l Penyediaan informasi yang l Penyediaan informasi yang l Penyediaan informasi yang l	engaburan Informas  erikan karena:** belum dikuasai a belum didokumentas  mor pendaftaran par memberi tanda (√	asikan ikan dilakukan dalam jangka waktu****  Putussibau,
B. I	Informasi tidak dapat dibe  Informasi yang diminta  Informasi yang diminta  Informasi yang diminta Penyediaan informasi yang l	erikan karena:** belum dikuasai a belum didokumentas mor pendaftaran par memberi tanda (√ okopi atau cd ) dan/a biaya yang telah dit	asikan ikan dilakukan dalam jangka waktu****  Putussibau,



Alamat : Jalan Antasari No. 8 Putussibau Email : ppid@kapuashulukab.go.id PUTUSSIBAU 78711

## PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK No. Pendaftaran: \*.....

Nama	·
Alamat	÷
	(i
Nomor Telp/email	:
Rincian Informasi yang di butuhkan	÷
	***************************************
	informasi publik dan dokumen yang kami terima, maka PPID ng dimohon adalah Tidak lengkap, mohon untuk segera melengkapi
dokumen tersebut yakni:	
Selanjutnya waktu untuk melengka	pi dokumen tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan
tidak lengkap diterima.	
	Putussibau,
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
	()
	Nama & Tandatanean

## Keterangan:

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.





Alamat : Jalan Antasari No. 8 Putussibau Email : ppid@kapuashulukab.go.id PUTUSSIBAU 78711

## PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

(RANGKAP DUA)

A. INFO	RMASI PENG <mark>A</mark> JU KEBERATAN	
Nomor Re	gistrasi Keberatan :	
	######################################	
	nggunaan Informasi :	
Identitas P	21000	
Nama	989 <u>-</u>	
Alamat		
Pekerjaan		
Nomor Te	lepon/E-Mail :	
Identitas	Kuasa Pemohon	
Nama	‡7 <u>2</u>	
Alamat	1000	
Nomor Te	depon/E-Mail :	
B. ALAS	AN PENGAJUAN KEBERATAN***	
□ Pe	rmohonan Informasi di tolak.	
	formasi berkala tidak disediakan	
	rmintaan informasi tidak ditanggapi	
	rmintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana	vana diminta
300	rmintaan informasi tidak dipenuhi	yang dimina
10E K		
	aya yang dikenakan tidak wajar formasi disampaikan melebihi jangka waktu yang	
C. KASU	S POSISI (tambahkan kertas bila perlu)	
petuga		TAN AKAN DIBERIKAN :
	Putussibat	*****
	Mengetahui,	
	Petugas Informasi (Penerima Keberatan)	Pengaju Keberatan
7		()
	Nama & Tanda Tangan	Nama & Tanda Tangan
KETERA	NGAN	
	Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasar	rkan buku register pengajuan keberatan
** 1	dentitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemo	ohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
		giju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
	Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalan langgal diisi dengan tanggal diterimanya pengaju	n UU KIP san keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buk





### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Antasari No. 08 PutussibauTelp.(0567) 21022

Email: diskominfo\_statistik@kapunshulukab.go.id Kode Pos 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

## NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan penyelenggaraan Fengelolaan Felayanan Informasi Dan Dekumentasi (PPID) Kabupaten Kapuas Hulu, dipandang pertu menetapkan Standar Opersional Prosedur (SOP):
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu;

- Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu;

  Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahum 1959 tentang
  Penetapan Undang-Undang Daruat Nomor 3 Tahum 1953
  tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
  9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambaban Lembaran
  Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
  Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambaban Lembaran
  Negara Republik Indonesia Nomor 64846);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
  Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
  Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
  Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
  Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 2008);

  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  - Negara Republiki Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;

    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Jundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

    8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

    8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukasan Informasi Publik:

    10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

    11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Rada Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

  - Kabupaten/kota;

    11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nonor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

    12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

    13. Peraturan Menteri Dajam Negeri Nomor 3 tahun 2017.

  - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010

  - Peraturan Komisi Informasi Nomor I tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
     Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
     Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
     Peraturan Publik Sandar Publik;
  - Hulu; 17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



18. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pelayanan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam Diktum KESATU menjadi pedoman acuan bagi Pengguna maupun pengelola dari Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu;
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di Putussibau Pada tanggal 28 Agustus 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,

> Ir. ISTIWA, M.Si Pembina Tk. I NIP.19650507 199803 1 006

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNA DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	ij
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Nama SOP	Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

- Dasar Hukum:

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

  2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan

  3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

## Keterkaitan:

## Peringatan:

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik.

## Kualifikasi Pelaksana:

- memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu; memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam а.
- memanami dengan baik ketentuan yang beriaku dalam pelaksanaan kegiatan; dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan; mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.
- d.
- Peralatan/Perlengkapan:
- ATK PC/Laptop Sinyal Internet
- Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id



		PELAKSANA		MUTU BAKU			- 1	
NO	KEGIATAN	PPID Pembantu	PPID Utama	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis	$\bigcirc$		- ATK - Daftar informasi dan dokumentasi	3 Hari	Tersedianya informasi dan dokumentasi		
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah di kumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat Informasi dan dokumentasi sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2018 Pasal 17 dan Pasal 18			Informasi dan Dokumentasi yang sudah terkumpul     UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Hari	Informasi dan Dokumentasi yang telah di verifikasi oleh PPID Pembantu		
3.	Mendokumentasikan dan mempublish Informasi publik dalam bentuk <i>Softcopy</i> ke ppid.kapuashulukab.go.id.	Tidak		Informasi dan Dokumentasi     PC/Laptop     Sinyal Internet     Username dan     Password     ppid.kapuashulukab.go.id	10 menit/ Dokumen	Informasi dan Dokumentasi yang terkumpul dan sudah diverifikasi oleh PPI*D Pembantu terupload di ppid.kapuashulukab.g o.id	tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi Informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat	
4.	Informasi dan Dokumentasi yang di upload oleh PPID Pembantu di verifikasi oleh PPID Utama	Ya	$\rightarrow$	PC/Laptop     Sinyal Internet     Username dan     Password     ppid.kapuashulukab.go.id	15 Menit	Informasi dan Dokumentasi telah diverifikasi oleh PPID Utama dan siap untuk di download menjadi Dokumen Informasi Publik (DIP)	Apabila ada kekurangan/kesalah an pada Informasi dan Dokumentasi maka akan diberitahukan kepada PPID Pembantu untuk diperbaiki	

5.	Mendowload Dokumen Informasi Publik (DIP) yang telah diverifikasi oleh PPID utama			PC/Laptop Sinyal Internet Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id	I Menit	Dokumen Informasi Publik (DIP) siap untuk di download	
----	---	--	--	--	---------	---	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. ISTIWA, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19630507 199803 1 006



## LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	į.
Tanggal Efektif	EUR LOPEN UND 10 HED-TO LEW SE US MITMETERS IS
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik Secara Offline

# Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan 3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu. Keterkaitan

Peringatan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan proses Pelayanan
Permohonan Informasi Publik Secara Offine, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktrpatan waktu serta
keterlambatan dalam proses Pelayanan Permohonan Informasi Publik Secara Offine.

### dan;

- Rusminkasi Pelaksasani.

  a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;

  b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

  c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website
- d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyetesaiki kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu. Peralatan/Perlengkapan: a. ATK b. PC/Laptop c. Sinyal Internet d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id e. Formulir Permohonan Informasi

Kualifikasi Pelaksana:

Pencatatan dan Pendataan

i- 10		8 .		AKSANA	2		MUTU BAKU	I.	- 8
NO	KEGIATAN	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama	PPID Pembantu	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4		3	5	6	7	8
-L	Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan	$\bigcirc$				- Daftar Informasi/dokume ntasi yang dibutuhkan pemohon	5 Menit	Permohonan Informasi masuk	
2	Memberikan Formulir Permohonan Informasi kepada Pemohon Informasi					- Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID informasi	1 Menit	Formulir permohonan informasi diterima pemohon	
3	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik.					- Formulir Permohonan Informasi - Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	30 Menit	Pemohon telah melakukan registrasi	
4	Memverifikasi registrasi berkas permohonan Informasi Publik dan meneruskan kepada PPID Utama			•		- Formulir Permohonan Informasi - PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab. go.id	10 Menit	- Pemohonan Informasi Publik diterima oleh pemohonan pabila permohonan informasi sudah ada di website PPID - Permohonan informasi diteruskan kepada PPID Utama	Jika dokomen / informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi! dokumentasi yang diminta belum terrnasuk dalarn DIP, maka berkas permohonan disampaikan



			i i					kepada PPID Utama atau PPID Pembantu.
5	Menerima Permohonan Informasi dan meneruskan/mendi sposisikan kepada PPID Pembantu.				- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab. go.id	5 Menit	Permohonan Informasi diteruskan ke PPID Pembantu yang membidangi Informasi dan dokumentasi yang di butuhkan oleh pemohon	
6	Memberikan informasi atau dokurnen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.			-	- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab. go.id	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	Informasi dan dokumentasi yang di minta tersedia di ppid.kapuashulukab.go.i d	
7	Memverifikasi Dokumen Informasi Publik yang diberikan oleh PPID Pembantu dan meneruskan kepada bagian registrasi PPID				- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab. go.id	10 Menit	Dokumen Informasi Publik telah diverifikasi oleh PPID Utama	
9	Mendowload Dokumen Informasi Publik (DIP) yang telah diverifikasi oleh PPID utama	J.			- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab. go.id	10 Menit	Dokumentasi Informasi Publi (DIP)	DIP yang telah di download diberikan kepada pemohon bisa secara langsung atau dikirim via E-mail

10 Menerima DIP yang dibutuhkan	Dokumentasi Informasi Publi (DIP)	enit Dokumentasi Informasi Publi (DIP) diterima oleh Pemohon	
---------------------------------	---	---	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,

> Ir. ISTIWA, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19630507 199803 1 006



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR ...... TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	THE CHEST COLD IN HISTORY LINE OF THE CONTRACTORS OF
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara Online

	Petayanan Permononan informasi Publik secara Online
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahum 2012 ten Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;     Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan     Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapur 44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan D Lingkungan Kabupaten Kapura Hulu.  Keterkaitan:	Informasi dan  bokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;  memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegjatan;  dan;  dan;  dan;  d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegjatan, tepat sasaran dan tepat waktu.
Acterian:	Peralatan/Perlengkapan: a. ATK b. PC/Laptop c. Sinyal Internet d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksana Permohonan Informasi Publik secara Online, dan jika tidak dilaksanakan akan i ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan keterlambatan dalam proses Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara Online.	nengakibatkan

	9		PELAKSANA		3	KET		
NO	KEGIATAN	Pemohon Informasi	PPID Utama	PPID Pembantu	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3			5	6	7	8
1.	Mengakses website ppid.kapuashulukab.go.id				- PC/Laptop - Sinyal Internet	5 Menit	Pemohon bisa untuk mencari informasi/Dokumen yang dibutuhkan	Setelah terakses ke ppid.kapuashulukab.go.id pergi ke beranda lalu klik kunjungi
2	Mencari Informasi/Dokumentasi yang dibutuhkan				- PC/Laptop - Sinyal Internet	15 Menit	Formulir permohonan informasi diterima pemohon	- Apabila Informasi/Dokumentasi yang dibutuhkan tersedia di ppid.kapuashulukab.go.id maka pemohon informasi bisa langsung mengunduhnya, jika tidak tersedia, bisa mengajukan permohonan Apabila belum memiliki akun di ppid.kapuashulukab.go.id pengguna diharuskan mendaftar akun terlebih dahulu
3	Mengajukan Permohonan Informasi/Dokumentasi				PC/Laptop     Sinyal Internet     Username dan     Password     ppid.kapuashulukab.     go.id	5 menit	Pemohon telah melakukan registrasi	Isi semua formulir pengajuan Informasi dengan benar dan Jelas.
4	Menerima Pengajuan Informasi/ Dokumentasi dari pemohonan dan meneruskan/ mendispos isikan permohonan tersebut kepada PPID Pembantu yang membidangi Informasi dan dokumentasi yang di butuhkan oleh pemohon				PC/Laptop     Sinyal Internet     Username dan     Password     ppid.kapuashulukab.     go.id	5 menit	- Permohonan Informasi diteruskan ke PPID Pembantu yang membidangi Informasi dan dokumentasi yang di butuhkan oleh pemohon	20

5	Memberikan informasi atau dokurnen yang diminta oleh pemohon informasi		- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab.g o.id	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	Informasi dan dokumentasi yang di minta tersedia di ppid.kapuashulukab.go.i d	
6	Memverifikasi Dokumen Informasi Publik yang diberikan oleh PPID Pembantu		- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab.g o.id	10 menit	Dokumen Informasi Publik telah diverifikasi oleh PPID Utama	
7	Memberitahukan kepada pemohon bahwa Dokumen Informasi Publik yang dibutuhkan sudah tersedia di ppid.kapuashulukab.go.id		- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab.g o.id	5 menit	Pemohon tersedia ppid.kapuashulukab.go.i d siap untuk di download pemohon informasi	
8	Mendowload Dokumen Informasi Publik (DIP)		- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab.g	5 menit	Dokumentasi Informasi Publik (DIP) diterima oleh Pemohon	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,

> Ir. ISTIWA, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19630507 199803 1 006

## LAMPIRAN IV

LAMPIRAN IV.
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Ekeitif
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Kapuas Hulu
Nama SOP
Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan</li> <li>Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.</li> </ol>	a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;     dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan;     d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	a. ATK b. PC/Laptop c. Sinyal Internet d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id e. Berkas pemohonan informasi/ dokumen
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses Uji Konsekuensi Informasi Publik	



		u: 10	PELA	KSANA					
NO	KEGIATAN	PPID Utama	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	PPID Pembantu	Pemohon	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4		i i	5	6	7	8
1.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.		7			Berkas pemohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi		Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2010		Surat Keputusan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi					Surat Keputusan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi		Surat Keputusan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi atas hasil Ujian konsekuensi diterima oleh PPID Utama	Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adala terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/ perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka rahasia, maka

					surat penolakan kepada pemohon informasi.
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.		- Informasi/Dokume ntasi yang di minta permohon atau surat penolakan	Informasi/Doku mentasi yang di minta permohon atau surat penolakan disampaikan ke pemohon	
5	Menerima Informasi/Dokumentasi yang di minta permohon atau surat penolakan		- Informasi/Dokume ntasi yang di minta permohon atau surat penolakan	- Informasi/Doku mentasi yang di minta permohon atau surat penolakan ditrima oleh pemohon	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KAPUAS HULU,

Ir. ISTIWA, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19630507 199803 1 006



## LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

P050 F05180501	
Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	SAN ACCOUNT MADE NAVO PROPERTY OF THE PROPERTY OF A
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Nama SOP	Penanganan Keberatan Informasi Publik

	Nama SOP	Penanganan Keberatan Informasi Publik
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayani Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Ka 44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dar Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.	an Informasi dan puas Hulu Nomor	a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;     c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan;     d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan;		Peralatan/Perlengkapan:
		a. ATK b. PC/Laptop c. Sinyal Internet d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id e. Formulir Pengajuan Keberatan
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan p Keberatan Informasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatka ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambe Penanganan Keberatan Informasi Publik	n ketidakpastian,	

			PEL/	AKSANA	.,				
NO	KEGIATAN	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID Utama dan PPID Pembantu	Kepala OPD	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan					Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat di unduh, Fotocopy atau scan identitas diri (NiK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	30 menit	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkpi fotocopy identitas diri (NIK), melalui website dengan mengis formulir yang telah diunduh dan rnenyertakan sca identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, mengiri melalui yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.



2	Melakukan verifikasi registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan Pengajuan keberatan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu	5	Formulir Pengajuan keberatan dan data infromasi yang diajukan oleh pemohon	15 menit	Formulir pengajuan keberatan terverifikasi oleh bagian registrasi	
	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan meneruskan kepada Kepala OPD	<u> </u>	Formulir Pengajuan keberatan dan data infromasi yang diajukan oleh pemohon	15 Menit	Formulir Pengajuan keberatan dan data infromasi yang diajukan oleh pemohon di telah periksa dan diteruskan kepada Kepala OPD	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi		Formulir Pengajuan keberatan dan data infromasi yang diajukan oleh pemohon	15 menit	Surat Keputusan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi atas hasil ujian konsekuensi diterima oleh PPID Utama	
4	Memberikan jawaban kepada Kepala OPD		- Informasi/Dokume ntasi yang di minta permohon atau surat penolakan	3 Hari	- Informasi/Doku mentasi yang di minta permohon atau surat penolakan	PPID Utama/Pembantu dapat memberikan informasi/dokumen tasi yang diminta oleh pemohon informasi informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status

		7.2				informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.
5	Menyampaikan jawaban kepada pemohon informasi - Dokumen/Informasi dapat diberikan kepada pemohon apabila bersifat terbuka dengan menandatangani tanda bukti penerimaan - memberikan surat penolakan kepada pemohon jika satus		- Informasi/Dokume ntasi yang di minta permohon atau surat penolakan	5 menit	- Informasi/Doku mentasi yang di minta permohon atau surat penolakan dirima oleh pemohon	To the second se
6	Menerima informasi/dokumentasi yang diminta Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka atau mendapat surat penolakan jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.		- Dokumen Informasi Publik (DIP) atau Surat Penolakan	5 menit	Hasil keputusan Keberatan Informasi Publik	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTEN KABUPATEN KAPUAS HULU,

> Pembina Tk.I NIP. 19630507 199803 1 006



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR ...... TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

	23
Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Nama SOP	Fasilitasi Seneketa informasi

	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
	Nama SOP	Fasilitasi Sengketa informasi
Dasar Hukum:	1.0	Kualifikasi Pelaksana:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Peme 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Per Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Das Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statis 44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layar Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.	erintahan; igelolaan Pelayanan Informasi dan erah; dan stik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor nan Informasi dan Dokumentasi di	<ul> <li>a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;</li> <li>b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</li> <li>c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan;</li> <li>d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ul>
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:
		a. ATK b. PC/Laptop c. Sinyal Internet d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id e. Form Surat Pengajuan Keberatan
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan d Sengketa informasi, dan jika tidak dilaksanakan akar ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan wakt Fasilitasi Sengketa informasi.	mengakibatkan ketidakpastian,	

			PELAKSANA	PELAKSANA		MUTU BAKU	1	KET	
NO	KEGIATAN	Pemohon Informasi	Kepala OPD	Tim fasilitasi sengketa informasi	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4		5	6	7	8	
1.	mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala OPD				- Form Surat Pengajuan Keberatan	30 menit	Pengajuan Keberatan dari pemohon informasi diterima Atasan PPID	Pengajuan Keberatan dalam waktu 10 (sepuluh) ham kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pernenuhan permohonan informasi selama7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	
2	menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama	3	•		Surat Pengajuan Keberatan	3 Hari	Tim fasilitasi sengketa informasi terbentuk	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pernbantu terkait, pejabat yang menangan bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan	
3	melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Kepala OPD				Surat Pengajuan Keberatan	1 Hari	Tim fasilitasi sengketa informasi telah membuat laporan kepada Atasan PPID atas Keberatan dari pemohion informasi	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan naungannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemphon Informasi	



4	Memberikan tanggapan kepada Pemohon laporan proses penanganan sengketa informasi dari Tim fasilitasi sengketa informasi		Laporan penanganan sengketa dari tim fasilitasi sengketa informasi	7 Hari	Pemohon mendapatkan tanggan atas laporan keberatan yang diajukan	
5	Dapat Melaporkan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan naungannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.		Laporan penanganan sengketa dari Atasan PPID	3 Hari		

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,

> Pembina Tk.I NIP. 19630507 199803 1 006

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Party Services - Many Transport - Control of Many Control of Contr
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupater Kapuas Hulu
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik

, £	- Chaokani hasiai mormasi rabik
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
a-Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 ter Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; b.Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan c. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan D Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.	Informasi dan binkan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	b. PC/Laptop c. Sinyal Internet d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id e. Form Surat Pengaiuan Keberatan
.Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelak Pendokumentasian Informasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambata Pendokumentasian Informasi Publik.	cetidakpastian,



	1		PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
NO	KEGIATAN	Operator OPD	PPID Pembantu	Kepala OPD	PERSYARATA N & PERLENGKAP AN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4		5	6	7	8
1,	Melakukan Identifikasi terkait informasi yang akan di dokumentasikan dan melaporkannya kepada ketua PPID	7			Bahan Informasi	1 Hari	Tersedianya Data	
2	Memerintahkan petugas PPID untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik		•		Data Informasi	15 Menit	Nota Dinas	
3	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik dan mengkalsifikasikan data hasil informasi menurut sifatnya publik (serta merta, berkala dan setiap saat) dalam bentuk soft file	1	Tidak		Nota Dinas, Bahan Informasi dari setiap bidang	1 hari	Konsep Daftar informasi Publik	Serta Merta: Informasi yang wajib di umumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Berkala: disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali; Setiap saat: untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan, wajib dan rutin disediakan badan publik
4	Memeriksa daftar informasi publik yang telah diklasifikasikan menurut sifatnya. Jika disetujui maka akan disampaikan kepada atasan PPID Jika tidak setuju menyerahkan kepada Petugas PPID untuk diperbaiki		Ya	Tidak	Konsep Daftar Informasi Publik	15 menit	Draft Daftar Informasi Publik	
5	Memerikaa Daftar Informasi Publik Jika setuju maka akan ditandatangani jika tidak setuju mengembalikan kepada Ketua PPID			Ya	Draft Daftar Informasi Publik	15 menit	Daftar Informasi Publik	

6 Daftar Informasi Publik yang telah ditandatangani atasan PPID (Pimpinan Badan Publik) dipublikasikan di website dan disimpan sebagai arsip	Daftar Informasi Publik	30 menit Daftar Informasi Publik ditampilkan di Aplikasi ppid.kapuashulu kab.go.id	
---	-------------------------------	--	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTAKABUPATEN KAPUAS HULU,

> Pembina Tk.I NIP. 19630507 199803 1 006



LAMPIRAN VIII LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR ..... TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	AND CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE CONTRACTOR ADDRESS OF THE CONTRACTOR ADDRESS OF THE CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE CONTRACTOR ADD
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

Da	sar Hukum:
a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
b.	Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
	Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
C.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
	44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di
	Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.
Ke	terkaitan:
-	Note a partie a description
-	
Per	ringatan:
SO	P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan proses
Per	ndokumentasian Informasi yang Dikecualikan, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan

keterlambatan dalam proses Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

### Kualifikasi Pelaksana:

- memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu; memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan: kegiatan; dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website
- dan; d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
- kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu. an:

Pe	ralatan,	Perlengkapa
a.	ATK	
1	DOM:	nton

- c. Sinyal Internet
- d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id e. Form Surat Pengajuan Keberatan Pencatatan dan Pendataan:

MUTU BAKU N & PERLENGKAP KEGIATAN Kepala OPD Pembantu AN Melakukan Identifikasi terkai rsedianya Data informasi yang akan di dokumentasikan dan n n dan melaporkannya kepada ketua PPID Memerintahkan petugas PPID untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang Data Informasi 15 Menit Nota Dinas dalam menghimpun serta melakukan uji konsekuensi untuk uji konsekuensi untuk mendokumentasikan data informasi yang dikecualikan Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi dan melakukan ujio konsekuensi terhadap informasi tersebut. Jika informasi berasal dari arsip, maka akan dilakukan pemilihan berdasarkan jadwal Retensi Arsip (JRA). Apakah termasuk kedalam arsif Aktif, Inaktif atau Statis Konsep Daftar Aktif : Tidak boleh diakses oleh orang yang tidak berkepentingan; Inaktif : boleh diakses atas Bahan informasi Informasi dari setiap bidang Publik izin pemilik; Statis : terbuka untuk siapapun. (Arsip Aktif dan Inaktif tidak boleh dibuka termasuk kedalam arsif Aktif, İnaktif atau Statis Memeriksa daftar informasi publik yang dikecualikan, Jika setuju maka akan disampaikan kepada atasan PPID Jika tidak setuju mengembalikan kepada Ketua PPID Tidak untuk publik) Informasi Publik yang Informasi yang dikecualikan dikecualikan Tidak Memeriksa Daftar Informasi yang dikecualikan Draft Daftar Daftar Informasi yang 15 menit Informasi yang Jika Setuju maka akan di tandatangani dikecualikan dikecualikan Jika tidak setuju mengembalikan kepada ketua PPID



Daftar Informasi yang dikecualikan telah ditandatangani atasan PPID ( Pimpinan Badan Publik) disimpan sebagai arsip	Daftar Informasi yang dikecualikan	30 menit Daftar Informasi yang dikecualikan diarsipkan	
--	--	---	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABURATEN KAPUAS HULU,

> Pembina Tk.I NIP. 19630507 199803 1 006

## **KLIPING**





Dinas Kesehatan

■ December 8, 2022 ③ 6.55 am

## Sub Koordinator Gizi Jadi Narasumber Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa



Sub Koordinator Gizi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Siti Wahdah, S.Gz., RD., MPH menjadi narasumber dalam kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kabupaten Kapuas Hulu di Gedung MABM Kapuas Hulu, Selasa (6/12/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu melalui Sub Koordinator Gizi Siti Wahdah memaparkan materi tentang Intervensi Gizi Spesifik Program Percepatan Penurunan Stunting.

Wahdah mengungkapkan bahwa, Stunting adalah hambatan pertumbuhan fisik Rentan terhadap penyakit, Hambatan perkembangan kognitif, Kekurangan Gizi yang sifatnya jangka panjang 1000 HPK.

"Gangguan Pertumbuhan anak dan akibat Perkembangan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan," paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Wahdah menyampaikan jika penanggulangan Stunting harus menjadi tanggung jawab Bersama yang diwujudkan dalam kebijakan, program kerja, partisipasi aktif seluruh masyarakat, media massa, dan dunia usaha.

Sebelum dimulainya penyampaian materi Oleh narasumber, kegiatan yang dihadiri Camat, seluruh Kepala Desa se Kabupaten Kapuas Hulu itu dibuka langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, SH.

## **KLIPING**







admin

## Pegawai Diskominfotik Kapuas Hulu Lakukan Perekaman IKD



iii January 4, 2023 (3 7:09 am



Transformasi digital terus dilakukan Pemerintah, salah satunya dengan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Kapuas Hulu melakukan perekaman IKD terhadap seluruh pegawai di Diskominfotik.

Kepala Diskominfo dan Statistik Kapuas Hulu, Hadi Pranata mengatakan bahwa IKD adalah salah satu bentuk transformasi digital. Pihaknya sangat mendukung perekaman data e-ktp tersebut.

"Selaku Diskominfo dan Statistik mendukung IKD. Untuk mendukung ini semua ASN dan non ASN di lingkup Diskominfo dan Statistik ikut perekaman IKD," ucapnya.

Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil kabupaten Kapuas Hulu, Walidad menjelaskan bahwa IKD tersebut mengacu pada Permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko KTP Elektronik serta penyelenggaraan IKD. "Ini kita lakukan bertahap di daerah karena inovasi Kemendagri Jewat Ditjen Capil mulai mengalihkan KTP Elektronik menjadi KTP Digital," ucap Walidad.

Walidad menuturkan pihaknya sudah masuk ke SKPD – SKPD, objek pendataannya pegawai dan tenaga kontrak. Selanjutnya masyarakat juga akan jadi objek perekaman. "Untuk kawasan kota sudah 32 titik perekaman IKD, pendataan sudah mencapai angka 956," tegasnya.

Untuk masyarakat sekitar Putussibau yang ingin perekaman IKD, kata Walidad, bisa datang ke Dukcapil. Kalau masyarakat di desa nanti ada sistem jemput bola dari Disdukcapil, jadi masyarakat tidak banyak biaya harus ke Putussibau. "Manfaat kedepan, IKD ini mempermudah akses pelayanan publik. Masyarakat data sudah ada di hp, bukan hanya ktp, ada kk, bpjs, npwp, vaksin, data pemilih kpu juga sudah ada di aplikasi," ucapnya.

IKD bukan berarti membuat e-KTP tidak dipakai lagi. Ini program untuk mengejar kemudahan bagi pengguna hp android.

"Masyarakat harus punya android, jaringan internet dan paket data, ialu email dan nomer hp aktif," tuntasnya. (Yohanes)



































